

PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI PUBLIK SERTA FUNGSI PEMERIKSAAN INTEN TERHADAP KINERJA PEMERINTAH

Syawaludin Hamdah Pela Kiri

udin122345@gmail.com

Nur Handayani

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of public accountability, public transparency, and internal audit function on the performance of the Surabaya city government in the Surabaya City Regional Government Work Unit. directly to the respondents, the sample selection method uses the purposive sampling method, namely the selection of samples based on predetermined criteria. The sample used as many as 80 respondents obtained from 20 Regional Work Units (SKPD) Surabaya City. The analytical method used is multiple linear regression analysis. The results of this study indicate that public accountability and the function of internal control affect the performance of local governments, while public transparency has no effect on the performance of local governments. Based on the test results, it can be concluded that the existence of public transparency cannot guarantee an increase in the performance of local governments, but with the existence of public accountability and internal audit functions within the scope of local governments that are accountable to the community, it will affect the level of performance of local governments that are getting better.

Keywords: public accountability, public transparency, intern auditing function

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh akuntabilitas publik, transparansi publik, dan fungsi pemeriksaan intern terhadap kinerja pemerintah daerah kota surabaya pada Satuan Kerja Prangkat Daerah Kota Surabaya. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode survey dan Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik kuisisioner yang dibagikan secara langsung kepada responden, metode pemilihan sampel menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu pemilihan sampel berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditentukan. Sampel yang digunakan sebanyak 80 responden yang didapat dari 20 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Surabaya. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas publik dan fungsi pengawasan intern berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah, sedangkan transparansi publik tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Berdasarkan hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa dengan adanya transparansi publik tidak dapat menjamin peningkatan kinerja pemerintah daerah, namun dengan adanya akuntabilitas publik dan fungsi pemeriksaan intern didalam lingkup pemerintah daerah yang dipertanggungjawabkan kepada masyarakat maka akan berpengaruh pada tingkat kinerja pemerintah daerah yang semakin baik.

Kata Kunci: akuntabilitas publik, transparansi publik, fungsi pemeriksaan intern, kinerja pemerintah daerah

PENDAHULUAN

Dalam organisasi sektor publik, kinerja instansi pemerintah merupakan gambaran pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penggambaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Dilatarbelakangi oleh semakin pentingnya peran instansi pemerintah daerah dan banyaknya persoalan yang muncul, di sisi lain pemerintah mengupayakan kesejahteraan rakyatnya dan fokus melakukan pembenahan. Tuntutan akan kinerja yang baik ini terjadi hampir di semua pemerintahan seiring dengan berjalannya

otonomi daerah dan pengesahan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan pemerintahan (Bharata, 2015). Pemerintah dituntut untuk memperlihatkan kinerja yang diluar batas biasa untuk membenahi persoalan sehingga dibutuhkan tolak ukur penilaian kinerja pemerintah (Arifin *et al.*, 2020). Sejak dikeluarkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 di Indonesia sendiri sistem pengukuran kinerja untuk pemerintah, baik pusat maupun daerah mulai diatur.

Isu tentang kinerja pemerintah daerah menjadi perhatian masyarakat karena belum menunjukkan hasil yang baik yang telah dirasakan oleh masyarakat. Dikarenakan masyarakat belum merasakan hasil kinerja pemerintah secara maksimal. Masyarakat menuntut pemerintah untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Permasalahan yang berhubungan dengan kinerja pemerintah daerah adalah buruknya kinerja pelayanan publik. Keluhan masyarakat beberapa tahun terakhir yang berkaitan dengan penyimpangan penyelenggaraan pelayanan publik masih keluhan mengenai kinerja pemerintah daerah.

Kinerja pemerintah harus diukur agar dapat diketahui bagaimana pemerintah melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya. Pengukuran kinerja adalah suatu proses sistematis untuk menilai apakah program kegiatan yang telah dirancang telah dilaksanakan sesuai dengan rancangan tersebut, dan yang paling penting adalah apakah telah tercapainya keberhasilan yang telah ditargetkan pada saat perancangan.

Akuntabilitas publik dan transparansi publik merupakan prinsip yang paling penting untuk mewujudkan kinerja pemerintah daerah yang baik. Akuntabilitas publik adalah sebuah informasi, pengungkapan aktivitas dan kinerja keuangan pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Jadi jika akuntabilitas dilakukan pemerintah terhadap pengelolaan keuangan daerah dapat meningkatkan kinerja pemerintah karena hasil kinerja pemerintah dapat diukur dari pencapaian akuntabilitas. Dalam menghadapi akuntabilitas publik tersebut, pemerintah harus memperhatikan beberapa hal yang penting diantaranya adalah anggaran, pengendalian akuntansi, efektifitas pelaksanaan anggaran dan sistem pelaporan.

Menurut Peraturan Pemerintah nomor 71 Tahun 2010 transparansi ialah memberikan informasi yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasar pada pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggung jawaban pemerintah dalam mengelola sumber daya dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan. Prinsip transparansi menyatakan suatu aspek dari proses penyelenggaraan pelayanan dapat dengan mudah di akses dan bersifat terbuka kepada para pengguna dan stakeholders yang memerlukan.

Fungsi pemeriksaan intern adalah fungsi pemeriksaan yang dilakukan secara bebas dan tidak terikat agar kinerja pemerintah dapat dikatakan berkualitas dalam pertanggungjawaban, apabila timbul masalah maka kinerja pemerintah daerah perlu dipertanyakan. Fungsi utama pemeriksaan intern dalam pemerintahan adalah membentuk pimpinan pemerintahan guna melaksanakan pemeriksaan dan pengendalian agar dapat memastikan keandalan sistem pengendalian intern pemerintah termasuk pengendalian akuntansi dan memerlukan pelaporan kepada pimpinan pemerintah daerah.

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan unit kerja pemerintah yang mendapat perincian dari publik terkait dengan kinerja pemerintah daerah. SKPD merupakan badan pelaksana fungsi eksekutif yang mengatur agar pelaksanaan pemerintahan berjalan dengan maksimal. SKPD mempunyai fungsi sebagai pusat pertanggung jawaban pembangunan daerah yang dipimpin oleh kepala satuan kerja selaku pengguna jasa. Beberapa penelitian terkait kinerja pemerintah daerah sudah dilakukan. Hasil penelitian menurut Hambur (2019) menyimpulkan bahwa akuntabilitas memiliki pengaruh positif terhadap kinerja pemerintah. Sedangkan menurut Jatmiko (2020) menyatakan bahwa transparansi berpengaruh positif dalam kinerja pemerintah daerah. Berbeda dengan hasil

riset dari Ratnawati dan Arnold (2011) menyatakan fungsi pemeriksaan intern berpengaruh terhadap kinerja pemerintah.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat diuraikan rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:(1) Apakah akuntabilitas publik berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah?, (2) Apakah transparansi publik berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah?, (3) Apakah fungsi pemeriksaan internal berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah? Sedangkan penelitian ini bertujuan: (1) Untuk menguji pengaruh akuntabilitas publik terhadap kinerja pemerintah daerah, (2) Untuk menguji pengaruh transparansi publik terhadap kinerja pemerintah daerah, (3) Untuk menguji pengaruh fungsi pemeriksaan internal terhadap kinerja pemerintah daerah.

TINJAUAN TEORITIS

Akuntabilitas Publik

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 yang berisi tentang akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Akuntabilitas juga berkaitan dengan mekanisme supervisi, pelaporan, dan pertanggungjawaban kepada pemegang kekuasaan yang lebih tinggi dalam birokrasi. Dengan ini para manajer publik diharapkan bisa membuat perubahan dari ketaatan pasif menjadi berpartisipasi aktif dalam penyusunan standar akuntabilitas yang sesuai dengan harapan dan keinginan publik. Akuntabilitas publik merupakan suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kegagalan atau keberhasilan visi, misi, strategi, maupun pelaksanaannya dalam institusi yang bersangkutan. Yang terdiri dari berbagai komponen dan merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan kinerja, perencanaan strategi, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja.

Transparansi Publik

Transparansi Publik merupakan keterbukaan pemerintahan dalam menyediakan informasi yang berkaitan dengan aktifitas pengelolaan sumber daya publik pada pihak-pihak yang membutuhkan informasi (Adisasmita, 2011:39). Transparansi juga berarti adanya penjelasan manajemen saktor publik tentang program dan kebijakan yang telah dan akan dilakukan beserta sumber daya yang digunakannya. Menurut Sedarmayanti (2007) tujuan dari adanya transparansi adalah untuk membangun rasa saling percaya pemerintah kepada masyarakat dimana pemerintah harus memberi informasi yang akurat terutama yang berhubungan dengan permasalahan serta mekanisme dalam mengakses informasi yang relevan. Transparansi dapat mengurangi peluang adanya kecurangan seperti korupsi dan lainnya di lingkungan pemerintah karena terlihat dari proses dan hasil kegiatan aktifitas yang dilaksanakan oleh pemerintah.

Fungsi Pemeriksaan Intern

Pemeriksaan diartikan sebagai suatu proses sistematis untuk mengidentifikasi masalah, menganalisa dan mengevaluasi yang dilakukan secara independen dan konstruktif serta dengan memberikan suatu pendapat jika dipandang perlu dilakukan rekomendasi. Pemeriksaan intern pemerintah berfungsi utama membentuk pimpinan pemerintah melakukan tugas pemeriksaan dan pengendalian serta dapat memastikan keandalan sistem pengendalian intern pemerintah termasuk pengendalian akuntansi dan melaporkannya kepada pimpinan pemerintah di daerah. Fungsi Pemeriksaan Intern merupakan proses kegiatan audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang ditetapkan

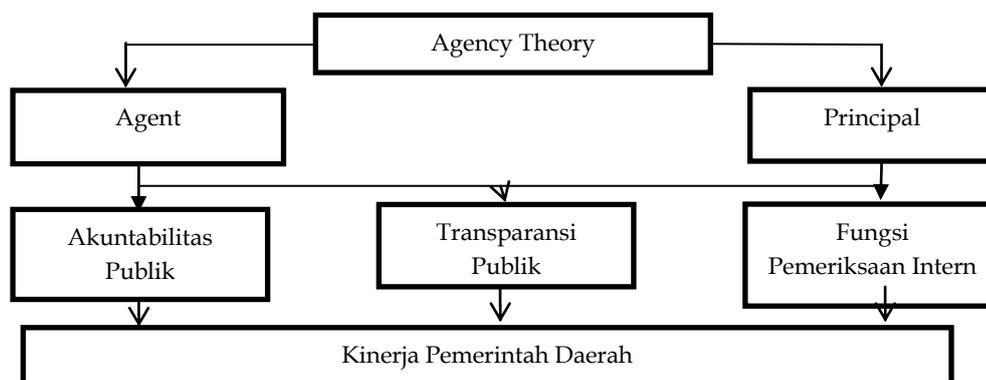
secara efektif dan efisien guna kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (Rohman, 2007).

Kinerja Pemerintah Daerah

Dalam organisasi pemerintah daerah kinerja merupakan hasil kerja yang telah dicapai oleh seseorang atau suatu kelompok organisasi berdasarkan wewenang dan tanggungjawab masing-masing dalam rangka mencapai suatu tujuan organisasi yang bersangkutan dan tidak melanggar hukum serta sesuai dengan moral dan etika yang ada. Dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 menyatakan bahwa kinerja merupakan hasil dari program atau kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas serta kualitas yang terukur.

Pemerintah daerah adalah suatu badan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pemerintah daerah adalah membantu dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Rerangka Konseptual



Gambar 1
Rerangka Pemikiran

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Akuntabilitas Publik terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Akuntabilitas publik memiliki makna yaitu, penyelenggaraan pemerintah yang baik dan mengurangi kesempatan praktek korupsi, nepotisme, dan kolusi, upaya meningkatkan manajemen pengelolaan dan wujud pertanggungjawaban pemerintah pada masyarakat. Hasil penelitian dari Suriani (2015) memperoleh hasil pengujian bahwa akuntabilitas publik berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja Kabupaten Wajo. Sedangkan penelitian dari Asrida (2012) menunjukkan hasil bahwa akuntabilitas publik berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

H₁: Akuntabilitas publik berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah

Pengaruh Transparansi Publik terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Transparansi yaitu keterbukaan informasi dan salah satu prinsip dari *Good Governance*. Transparansi merupakan prinsip yang menjamin kebebasan bagi setiap orang untuk mendapatkan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan. Transparansi diperlukan sebagai alat pengawasan untuk pemerintah dalam mengendalikan sumber daya publik sehingga akan meningkatkan hasil kinerja pemerintah daerah. Hasil penelitian dari Novatiani *et al.*, (2019) mengatakan transparansi berpengaruh baik terhadap kinerja instansi pemerintah. Penelitian ini sama dengan penelitian terdahulu oleh Sabarno (2007)

menyatakan transparansi berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah bagi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

H₂: Transparansi publik berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah.

Pengaruh Fungsi Pemeriksaan Intern terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Pemeriksaan dapat diartikan juga sebagai proses sistematis untuk mengidentifikasi masalah, analisa, dan evaluasi yang dilakukan secara independen dan konstruktif dengan pemberian atau pendapatan dan apabila dipandang perlu direkomendasikan. Pemeriksaan intern pemerintah berfungsi utama bagi pembentukan pimpinan pemerintah, melakukan tugas pemeriksaan dan pengendalian serta dapat memastikan keandalan sistem pengendalian intern pemerintah termasuk pengendalian akuntansi dan melaporkan kepada pimpinan pemerintah pusat di daerah (Ratnawati dan Arnold, 2011).

Berdasarkan argumentasi teoritis dan hasil penelitian sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan hipotesis, bahwa fungsi pemeriksaan intern berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah karena pelaksanaan pemerintah pemerintah harus berpedoman pada suatu standar pemeriksaan.

H₃: Fungsi Pemeriksaan Intern berpengaruh positif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran dari Objek Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Penelitian ini menggunakan metode Kausal Komparatif (*Causal-Comparative Research*) yaitu penelitian dengan karakteristik masalah yang dapat dilakukan melalui studi. Sumber data diambil berdasarkan data primer. Populasi yang digunakan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Surabaya.

Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* menetapkan pertimbangan-pertimbangan atau kriteria-kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh sampel yang digunakan dalam penelitian. Adapun kriteria sampel yang akan digunakan yaitu aparat pemerintah yang bekerja di SKPD Kota Surabaya yang memiliki kriteria Kepala Dinas, Kepala Bagian, Sekretaris, dan Staff.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode survey. Survey dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner atau angket kepada responden yang termasuk dalam populasi penelitian. Metode survey melalui kuisisioner ini menghasilkan data primer yang digunakan peneliti sebagai acuan dalam mengelola data untuk pengujian hipotesis.

Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Variabel Penelitian

Variabel bebas yaitu variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen atau terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini menggunakan variabel akuntabilitas publik, transparansi publik dan fungsi pemeriksaan intern. Variabel terikat yaitu variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel terikat disebut juga dengan variabel output, konsekuen, variabel kriteria, dan variabel efek. Variabel terikat dari penelitian ini adalah Kinerja Pemerintah daerah.

Definisi Operasional Kinerja Pemerintah Daerah

Kinerja pemerintah daerah merupakan hasil dari kegiatan dan program pemerintah yang telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kualitas dan kuantitas yang sudah terukur. Menurut Mahsun, 2006 (dalam Mete, 2019) indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja pemerintah daerah yaitu: (1) Indikator Masukan (*Input*), (2) Indikator Proses (*Process*), (3) Indikator Keluaran (*Output*), (4) Indikator Hasil (*Outcome*), (4) Indikator Manfaat (*Benefit*)

Akuntabilitas Publik

Akuntabilitas publik merupakan prinsip yang menjamin bahwa setiap penyelenggaraan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada pihak yang berkepentingan dengan penerapan kebijakan. Menurut Mardiasmo (2006) ada empat indikator yang mengukur akuntabilitas publik antara lain: (1) Akuntabilitas hukum dan kejujuran, (2) Akuntabilitas proses, (3) Akuntabilitas kebijakan, (4) Akuntabilitas program.

Transparansi Publik

Transparansi publik merupakan asas membuka diri terhadap hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar dan jujur tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan memperhatikan kepentingan atau perlindungan atas hak asasi pribadi serta rahasia negara. Menurut Meme (2019) ada indikator yang dapat mengukur transparansi publik yaitu: (1) Adanya sistem keterbukaan dan standarisasi, (2) Adanya mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan publik dalam penyelenggaraan pemerintah, (3) Adanya mekanisme pelaporan maupun penyebaran informasi.

Fungsi Pemeriksaan Intern

Fungsi Pemeriksaan Intern merupakan suatu fungsi dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi aktivitas organisasi yang sedang dilakukan, terutama dalam pertanggungjawaban keuangan negara. Menurut Bastian (2008) ada indikator yang dapat mengukur fungsi pemeriksaan intern antara lain: (1) Lingkungan pengendalian, (2) Penilaian Risiko, (3) Kegiatan Pengendalian, (4) Informasi dan Komunikasi, (5) Pemantauan.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan suatu langkah yang paling menentukan dari suatu penelitian, karena analisis data berfungsi sebagai menentukan kesimpulan hasil penelitian. Analisis data ini menggunakan *Software SPSS (Statistical Product and Service Solution)*.

Analisis Statistik Deskriptif

Menurut Sugiyono (2012: 199) analisis statistik deskriptif adalah analisis data statistik yang digunakan dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah dikumpulkan tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang telah tergeneralisasi.

Uji Validitas

Jika suatu instrumen dalam penelitian dikatakan valid maka hal tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur (Sugiyono, 2017: 198). Ghazali (2016: 53) juga menentukan pengukuran uji validitas, yaitu: (a) Jika $r_{hitung} > r_{Tabel}$ maka pertanyaan dinyatakan valid. (b) Sebaliknya, jika $r_{hitung} \leq r_{Tabel}$ maka pertanyaan dinyatakan tidak valid.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengukur sejauh mana suatu pengukuran dikatakan (tanpa bias) bebas kesalahan karena itu menjamin pengukuran yang valid dan konsisten. Alat pengukur hasil uji reliabilitas dapat dilakukan dengan uji statistik *Cronbach Alpha*. Hasil uji dapat dikatakan reliabel apabila nilai *Cronbach Alpha* masing-masing variabel $> 0,60$ (Ghozali, 2016: 43).

Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi Klasik berfungsi untuk mengetahui kepastian bahwa persamaan regresi linier berganda yang didapatkan memiliki ketepatan dalam estimasi, tidak bias dan konsisten.

Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2016: 154) uji normalitas merupakan uji statistik yang digunakan untuk menguji model regresi variabel yang diteliti apakah berdistribusi normal atau tidak dengan menggunakan *One Sample Kolmogorov Smirnov* dengan ketentuan sebagai berikut: (a) Jika probabilitas $> 0,05$ maka distribusi dari model regresi adalah normal, (b) Jika probabilitas $< 0,05$ maka distribusi dari model regresi adalah tidak normal.

Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas dilakukan untuk menguji atau mendeteksi ada tidaknya korelasi antara variabel independen dalam model regresi (Ghozali, 2016: 103). Untuk memenuhi kriteria *BLUE* maka seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel independen. Apabila telah diuji dan ditemukannya terjadi korelasi maka terdapat *problem multikolinieritas*. Untuk mengetahui apakah terjadi *problem multikolinieritas* atau tidak yaitu dengan melihat besaran *VIF (Variance Inflation Factor)* dan *tolerance*. Apabila angka *tolerance* dari suatu model regresi kurang dari 0,1 serta $VIF > 10$ hal tersebut berarti terdapat *problem multikolinieritas*.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji ada atau tidaknya gejala heteroskedastisitas yaitu dengan menggunakan grafik *plot* atau *scatterplot*. Apabila titik-titik dalam grafik membentuk pola yang teratur maka dapat disimpulkan terjadi gejala heteroskedastisitas. Apabila titik-titik dalam grafik membentuk pola yang menyebar diatas dan di bawah angka nol sumbu Y maka dapat disimpulkan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas (Ghozali, 2016: 134).

Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linier berganda merupakan analisis untuk mengetahui arah hubungan antara variabel dependen dan variabel independennya, analisis ini dilakukan saat suatu penelitian terdapat minimal dua variabel independennya. Formulasi persamaan regresi linier berganda dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$KPD = \alpha + \beta_1 AP + \beta_2 TP + \beta_3 FP + e$$

Keterangan :

KPD : Kinerja Pemerintah Daerah

α : Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$: Koefisien Regresi dari masing-masing variabel bebas

AP : Akuntabilitas Publik

TP : Transparansi Publik

FP : Fungsi Pemeriksaan Intern

e : Error

Uji F

Uji F pada dasarnya digunakan untuk menunjukkan pengaruh variabel-variabel independenterhadap variabel dependen. Kriteria pengujian: (a) $P_{\text{Value}} < 0,05$ menunjukkan bahwa uji kelayakan model layak dan fit untuk digunakan pada penelitian. (b) $P_{\text{Value}} > 0,05$ menunjukkan bahwa uji kelayakan model tidak layak dan fit untuk digunakan pada penelitian.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Analisis koefisien determinasi ini dilakukan untuk mengukur kuat atau tidaknya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Semakin kuat pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat berarti R^2 yang diperoleh mendekati satu. Apabila R^2 mendekati nol maka semakin lemah hubungan antara keduanya.

Uji Hipotesis (Uji t)

Uji t atau uji parsial merupakan pengujian yang dilakukan untuk menguji pengaruh di setiap variabel independen secara individu terhadap variabel dependennya (Ghozali, 2016: 99). Pengujian hipotesis akan dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 0,05 ($\alpha = 5\%$) atau tingkat keyakinan sebesar 0,95. Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria: (a) Jika nilai signifikan $> 0,05$ maka hipotesis ditolak (koefisien regresi tidak signifikan). Ini berarti secara parsial variabel independen tidak mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. (b) Jika nilai signifikan $\leq 0,05$ maka hipotesis diterima (koefisien regresi signifikan). Ini berarti secara parsial variabel independen tersebut mempunyaipengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

Pengumpulan data dilakukan dengan mendatangi dan memberikan kuesioner secara langsung kepada responden pada 20 SKPD yang terdiri dari 16 Dinas dan 4 Badan. Kuesioner yang dibagikan untuk setiap SKPD sebanyak 4 kuesioner, sehingga jumlah kuesioner yang dibagikan sebanyak 80 kuesioner.

Uji Validitas dan Reliabilitas

Uji Validitas

Untuk mengetahui uji validitas, dapat digunakan koefisien korelasi yang nilai signifikannya lebih kecil dari 5% menunjukkan bahwa pernyataan-pernyataan tersebut sudah valid sebagai pembentuk indikator. Hasil dari uji validitas dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Berdasarkan Tabel 1 dibawah ini pengujian validitas pada variabel akuntabilitas publik menunjukkan bahwa pada tiap item pertanyaan valid karena memperoleh nilai signifikansi kurang dari 0,05 dan nilai r hitung yang didapatkan lebih besar dari r Tabel (r Tabel diperoleh dari rumus $df = n-2$, $\alpha = 0,05$) maka $80-2 = 78$ dengan $\alpha = 0,05$ jadi nilai r Tabel adalah 0,218. Sehingga menunjukkan bahwa item pertanyaan yang digunakan untuk mengukur variabel akuntabilitas publik dinyatakan valid.

Tabel 1
Hasil Analisis Uji Validitas Akuntabilitas Publik

Variabel	Item Pertanyaan	r hitung	r Tabel	Keterangan
Akuntabilitas Publik	X1	0,633	0,218	Valid
	X2	0,688	0,218	Valid
	X3	0,838	0,218	Valid
	X4	0,767	0,218	Valid
	X5	0,650	0,218	Valid

Sumber: Data Primer yang diolah (2021)

Tabel 2
Hasil Uji Validitas Transparansi Publik

Variabel	Item Pertanyaan	r hitung	r Tabel	Keterangan
Transparansi Publik	X1	0,670	0,218	Valid
	X2	0,709	0,218	Valid
	X3	0,405	0,218	Valid
	X4	0,630	0,218	Valid
	X5	0,593	0,218	Valid

Sumber: Data Primer yang diolah (2021)

Berdasarkan Tabel 2 pengujian validitas pada variabel transparansi publik menunjukkan bahwa pada tiap item pertanyaan valid karena memperoleh nilai signifikansi kurang dari 0,05 dan nilai r hitung yang didapatkan lebih besar dari r Tabel (r Tabel diperoleh dari rumus $df = n-2$, $\alpha = 0,05$) maka $80-2 = 78$ dengan $\alpha = 0,05$ jadi nilai r Tabel adalah 0,218. Sehingga menunjukkan bahwa item pertanyaan yang digunakan untuk mengukur variabel transparansi publik dinyatakan valid.

Berdasarkan Tabel 3 dibawah ini pengujian validitas pada variabel fungsi pemeriksaan intern menunjukkan bahwa pada tiap item pertanyaan valid karena memperoleh nilai signifikansi kurang dari 0,05 dan nilai r hitung yang didapatkan lebih besar dari r Tabel (r Tabel diperoleh dari rumus $df = n-2$, $\alpha = 0,05$) maka $80-2 = 78$ dengan $\alpha = 0,05$ jadi nilai r Tabel adalah 0,218. Sehingga menunjukkan bahwa item pertanyaan yang digunakan untuk mengukur variabel fungsi pemeriksaan intern dinyatakan valid.

Tabel 3
Hasil Uji Validitas Fungsi Pemeriksaan Intern

Variabel	Item Pertanyaan	r hitung	r Tabel	Keterangan
Fungsi Pemeriksaan Intern	X1	0,776	0,218	Valid
	X2	0,715	0,218	Valid
	X3	0,746	0,218	Valid
	X4	0,681	0,218	Valid
	X5	0,806	0,218	Valid

Sumber: Data Primer yang diolah (2021)

Tabel 4
Hasil Uji Validitas Kinerja Pemerintah Daerah

Variabel	Item Pertanyaan	r hitung	r Tabel	Keterangan
Kinerja Pemerintah Daerah	X1	0,777	0,218	Valid
	X2	0,754	0,218	Valid
	X3	0,727	0,218	Valid
	X4	0,793	0,218	Valid
	X5	0,756	0,218	Valid
	X6	0,803	0,218	Valid
	X7	0,804	0,218	Valid

Sumber: Data primer yang diolah (2021)

Berdasarkan Tabel 4 pengujian validitas pada variabel kinerja pemerintah daerah menunjukkan bahwa pada tiap item pertanyaan valid karena memperoleh nilai signifikansi kurang dari 0,05 dan nilai r hitung yang didapatkan lebih besar dari r Tabel (r Tabel diperoleh dari rumus $df = n-2$, $\alpha = 0,05$) maka $80-2 = 78$ dengan $\alpha = 0,05$ jadi nilai r Tabel adalah 0,218. Sehingga menunjukkan bahwa item pertanyaan yang digunakan untuk mengukur variabel kinerja pemerintah daerah dinyatakan valid.

Berdasarkan Tabel 5 dibawah ini nilai *Cronbach Alpha* masing-masing variabel akuntabilitas publik, transparansi publik, fungsi pemeriksaan intern dan kinerja pemerintah daerah > 0,60 sehingga jawaban yang diberikan responden dari butir-butir pernyataan dari seluruh variabel dapat diandalkan dan dapat digunakan dalam penelitian.

Tabel 5
Uji Realibilitas Variabel

Variabel	<i>Cronbach Alpha</i>	Keterangan
Akuntabilitas Publik (AP)	0,880	Reliabel
Transparansi Publik (TP)	0,780	Reliabel
Fungsi Pemeriksaan Intern (FPI)	0,895	Reliabel
Kinerja Pemerintah Daerah (KPD)	0,928	Reliabel

Sumber: Data primer diolah (2021)

Uji Reliabilitas

Suatu kuesioner dapat dikatakan reliabel jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Menurut Ghazali (2016: 132) dalam mengukur reliabilitas dapat dilakukan dengan melihat *Cronbach Alpha*. Suatu variabel dapat dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* > 0,60. Dari hasil uji reliabilitas nilai *Cronbach Alpha* pada variabel akuntabilitas publik, transparansi publik, fungsi pemeriksaan intern dan kinerja pemerintah daerah dapat dilihat dibawah ini:

Nilai *Cronbach Alpha* masing-masing variabel akuntabilitas publik, transparansi publik, fungsi pemeriksaan intern dan kinerja pemerintah daerah > 0,60 sehingga jawaban yang diberikan responden dari butir-butir pernyataan dari seluruh variabel dapat diandalkan dan dapat digunakan dalam penelitian.

Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Analisis Deskriptif di dalam sebuah penelitian penting untuk dilakukan bertujuan untuk menganalisis tanggapan dari responden terhadap setiap indikator dalam kuisisioner. Berdasarkan hasil uji yang didapat menunjukkan rata-rata tanggapan responden tentang seluruh aspek dari variabel yang diteliti dalam interval kelas termasuk dalam kategori $4,21 < x \leq 5,00$, yang menunjukkan responden memberi nilai sangat setuju atas pernyataan tentang semua aspek dari variabel pada SKPD Kota Surabaya.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

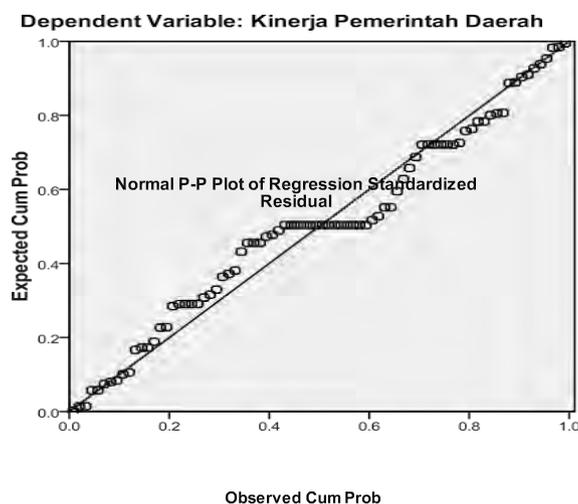
Pada uji normalitas data bertujuan untuk menguji apakah sebuah model regresi antara variabel dependen (terikat) dan variabel independen (bebas) atau keduanya memiliki distribusi normal atau tidak. Metode yang digunakan untuk mengetahui kenormalan model. Regresi adalah uji statistik non parametric *Kolmogorov-smirnov test* dan grafik *normal probability plot of standarized residual*. Berikut hasil uji statistik non parametrik *Kolmogorov-smirnov* dilampirkan pada Tabel:

Berdasarkan Tabel 6 dibawah ini diketahui bahwa hasil *Kolmogorov-smirnov* 0,938 dan nilai signifikansinya $0,342 > 0,05$. Dengan demikian disimpulkan bahwa data distribusi pada pengujian normalitas berdistribusi normal dan layak.

Tabel 6
Hasil Uji Statistik Non-Parametrik Kolmogorov-Smirnov

	Unstandardized Residual
Kolmogorov-Smirnov	0,938
Asymp.Sig	0,342

Sumber: Data primer diolah (2021)



Gambar 2
Grafik Uji Normalitas Data
Sumber: Data Kuisisioner, 2021

Berdasarkan tampilan pada gambar terlihat titik-titik menyebar dan mengikuti garis diagonal, dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas dan layak digunakan dalam penelitian.

Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya multikolinearitas didalam model regresi. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen (bebas). Uji multikolinearitas dapat dilihat dari nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dan lawannya yaitu nilai tolerance (*tolerancevalue*). Apabila nilai tolerance $> 0,10$ atau nilai VIF < 10 maka disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antar variabel dalam model regresi. Berikut hasil pengujian multikolinearitas dapat dilihat pada Tabel 7:

Tabel 7
Hasil Uji Multikolinieritas

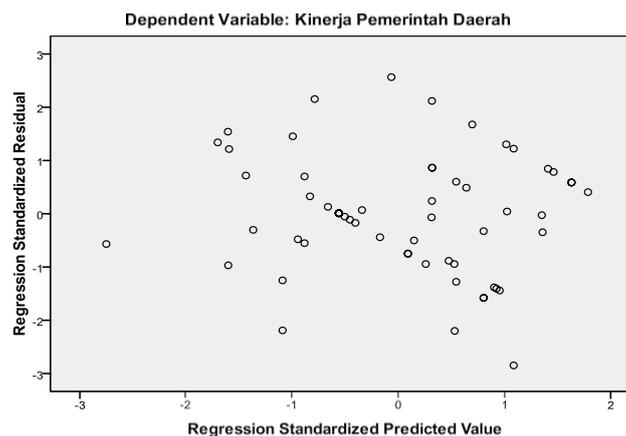
Model	Coefficient ^a	
	CollinearityStatistics	
	Tolerance	VIF
AP	0,591	1,691
TP	0,581	1,721
FPI	0,621	1,611

Sumber: Data primer diolah (2021)

Berdasarkan Tabel 8 menunjukkan bahwa ketiga variabel independen yang meliputi AP, TP dan FPI mempunyai nilai tolerance $> 0,10$ dan nilai VIF < 10 . Dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi tidak terdapat adanya multikolinearitas antar variabel independen dan dapat dikatakan bahwa model regresi layak untuk digunakan dalam penelitian ini.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terdapat ketidaksamaan *variance* dari residual suatu periode pengamatan ke pengamatan yang lain. Untuk mendeteksi ada dan tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola yang terbentuk pada grafik *scatterplot*, untuk mengetahui ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat gambar berikut ini:



Gambar 3
Grafik Uji Heteroskedastisitas
Sumber: Data Kuisisioner, 2021

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa tidak terdapat pola yang jelas dan titik-titik yang tersebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, kesimpulannya pada penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi dan layak untuk digunakan dalam penelitian.

Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh akuntabilitas, transparansi dan pengawasan terhadap kinerja pelayanan instansi pemerintah Kota Surabaya. Data yang diperoleh dan diolah dengan menggunakan bantuan computer program SPSS, maka dihasilkan persamaan regresi linear berganda yang dapat dilihat pada Tabel:

Tabel 8
Hasil Analisis Regresi Linear Berganda Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	0,735	0,365		2,017	0,047
AP	0,507	0,093	0,523	5,445	0,000
TP	-0,096	0,095	-0,098	-1,008	0,317
FPI	0,404	0,092	0,414	4,409	0,000

a. Dependent Variable: KPD
Sumber: Data Kuisisioner, 2021

Berdasarkan Tabel 8 di atas dapat dibentuk persamaan regresi linear berganda yaitu $KPD = 0,735 + 0,507 AP + -0,096 TP + 0,404 FPI ++ e$. Dari persamaan regresi yang didapat menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas publik dan fungsi pemeriksaan intern memiliki nilai koefisien positif. Sedangkan transparansi publik memiliki nilai koefisien negatif.

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Uji koefisien determinasi (R²) bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Nilai koefisien determinasi antara nol dan satu. Berikut hasil pengujian koefisien determinasi (R²) dapat dilihat pada Tabel:

Tabel 9
Hasil Koefisien Determinasi (R²)

Model	R	R Square	Model Summary ^b	
			Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,765	0,585	0,569	0.31958

a. Predictors: (Constant), AP, TP, FPI

b. Dependent Variable: KPD

Sumber: Data Kuisisioner, 2021

Tabel 9 menjelaskan besarnya nilai koefisien determinasi (R²) yaitu sebesar 0,585 yang berarti menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah Kota Surabaya dipengaruhi oleh variabel independen yang meliputi akuntabilitas publik, transparansi publik dan fungsi pemeriksaan intern. Sedangkan sisanya sebesar 41,5% dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak diikutsertakan dalam penelitian.

Uji F

Uji F digunakan untuk menguji kelayakan model penelitian. Model dapat dikatakan layak, apabila hasil pengolahan data yang dihasilkan dengan bantuan SPSS nilai signifikansinya $< 0,05$. Sehingga dapat diketahui apakah model termasuk dalam kategori cocok (*fit*) atau tidak. Berikut hasil uji f dapat dilihat pada Tabel :

Tabel 10
Hasil Uji F

ANOVA ^b						
	Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	10,936	3	3,645	35,694	.000 ^a
	Residual	7,762	76	0,102		
	Total	18,698	79			

A. Predictors: (Constant), AP, TP, FPI

B. Dependent Variable: KPD

Sumber: Data Kuisisioner, 2021

Berdasarkan pada Tabel 10 diketahui bahwa tingkat signifikansi 0,000 yang berarti lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas publik, transparansi publik dan fungsi pemeriksaan intern berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah Kota Surabaya. Sehingga uji model dikatakan layak atau cocok (*fit*) digunakan dalam penelitian ini.

Uji Hipotesis (Uji t)

Uji t pada dasarnya digunakan untuk menunjukkan apakah suatu variabel bebas yaitu akuntabilitas publik, transparansi publik dan fungsi pemeriksaan intern memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel terikat yaitu kinerja pemerintah daerah. Berikut hasil uji t dapat dilihat pada Tabel:

Tabel 11
Hasil Uji t Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	0,735	0,365		2,017	0,047
AP	0,507	0,093	0,523	5,455	0,000
TP	-0,096	0,095	-0,098	-1,008	0,317
FPI	0,404	0,092	0,414	4.409	0,000

a. Dependent Variable: KPD

Sumber: Data Kuisisioner, 2021

PEMBAHASAN

Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas akuntabilitas publik terhadap variabel terikat kinerja pemerintah daerah. Berdasarkan hasil uji hipotesis diketahui nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H_1 yang menyatakan akuntabilitas publik berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah dapat diterima. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas publik berpengaruh positif terhadap kinerja pelayanan yang artinya apabila kinerja pelayanan

tersebut baik itu dipengaruhi oleh adanya penerapan akuntabilitas publik yang baik dalam organisasi pemerintah tersebut. Akuntabilitas publik yang baik disebabkan karena terdapat organisasi pemerintah yang menjalankan prosedur yang ada dengan baik sehingga dapat menimbulkan kinerja organisasi yang baik agar dapat terciptanya kinerja pemerintah yang sesuai dengan tujuan organisasi pemerintah daerah tersebut. Jadi pemerintah kota Surabaya harus tetap mempertahankan dan meningkatkan prinsip akuntabilitas publik yaitu prinsip pertanggungjawaban terhadap hasil kinerja agar dapat membangun pemerintahan yang lebih baik lagi.

Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian dari Suriani (2015) memperoleh hasil pengujian bahwa akuntabilitas publik berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja Kabupaten Wajo. Sedangkan penelitian dari Asrida (2012) menunjukkan hasil bahwa akuntabilitas publik berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

Pengaruh Transparansi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas transparansi publik terhadap variabel terikat kinerja pemerintah daerah. Berdasarkan hasil uji hipotesis diketahui nilai signifikansi sebesar $0,317 > 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H_2 yang menyatakan bahwa transparansi publik berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah ditolak. Pernyataan ini diperkuat karena peran transparansi kebijakan publik tidak dapat berjalan sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh pemerintah dikarenakan tidak adanya keterbukaan anggaran terhadap masyarakat. Hal tersebut membuat masyarakat merasa bahwa transparansi pengelolaan keuangan anggaran dalam hal ini masih kurang dan perlu adanya perbaikan. Dampaknya masyarakat jadi kurang mengerti hasil dari pertanggungjawaban aparat pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak instansi pemerintah yang tidak mempublikasikan laporan keuangan kepada publik karena laporan keuangan tersebut masih belum disajikan secara menyeluruh dan sifatnya tertutup.

Sedangkan hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hasil penelitian dari Novatiani *et al.*, (2019) yang menyatakan bahwa transparansi publik berpengaruh baik terhadap kinerja instansi pemerintah.

Pengaruh Fungsi Pemeriksaan Intern Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas pemeriksaan intern terhadap variabel terikat kinerja pemerintah daerah. Berdasarkan hasil uji hipotesis diketahui nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H_3 yang menyatakan fungsi pemeriksaan intern berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah dapat diterima. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa fungsi pemeriksaan intern berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah yang memiliki arti apabila kinerja pemerintah daerah tersebut baik itu dipengaruhi oleh lingkungan pengendalian dan penilaian risiko yang terlaksana dengan baik dalam organisasi pemerintah tersebut. Fungsi pemeriksaan intern yang baik disebabkan karena adanya kegiatan pengendalian yang matang dan adanya peninjauan kinerja secara periodik oleh instansi pemerintah.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Jitma *et al.*, (2017) yang menyatakan bahwa fungsi pemeriksaan intern berpengaruh positif terhadap kinerja instansi pemerintah daerah.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan diperoleh kesimpulan bahwa: (1) Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas publik berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah artinya semakin kuat dan tinggi akuntabilitas publik

maka akan semakin berpengaruh baik terhadap hasil kinerja pemerintah daerah, (2) Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi publik berpengaruh negatif terhadap kinerja pemerintah daerah artinya transparansi publik tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah, (3) Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fungsi pemeriksaan intern berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah artinya semakin kuat dan tinggi fungsi pemeriksaan intern maka akan semakin berpengaruh baik terhadap hasil kinerja pemerintah daerah.

Keterbatasan

Penelitian ini telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan pedoman yang ada, namun masih memiliki keterbatasan, antara lain: (1) Objek penelitian hanya difokuskan pada 20 SKPD di Kota Surabaya, sehingga hasil penelitian terbatas hanya mencerminkan kondisi yang ada di SKPD yang dijadikan objek penelitian tersebut, (2) Penelitian ini hanya menggunakan tiga variabel yang mempengaruhi kinerja pemerintah daerah, yaitu akuntabilitas publik, transparansi publik, dan fungsi pemeriksaan intern, (3) Karena keterbatasan waktu dan jarak kuesioner ditinggalkan disetiap SKPD sehingga peneliti tidak bisa mendampingi secara langsung responden padasaat menjawab kuesioner, mengakibatkan jawaban yang diberikan belum tentu mencerminkan keadaan yang sebenarnya.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan, makasaran yang dapat disampaikan, antara lain: (1) Peneliti selanjutnya sebaiknya menambahkan variabel-variabel lainnya yang masih mempengaruhi kinerja pemerintah daerah, serta dapat menambah jumlah sampel penelitian agar data yang dihasilkan lebih akurat, (2) Peneliti selanjutnya sebaiknya melakukan wawancara secara langsung kepada responden untuk meningkatkan pemahaman sehingga responden dapat memberikan data yang lebih valid dan jelas.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita. 2011. *Manajemen Pemerintah Daerah*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Arifin, W., M. Saiful, dan Suhartono. 2020. Pengaruh Akuntabilitas Publik Transparansi Dan Fairness Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Dengan Pemanfaatan Accounting Information System Sebagai Pemoderasi. *Islamic Accounting and Finance Review* 1(2):67-82.
- Asrida. 2012. Pengaruh Penerapan Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi Keuangan Terhadap Kinerja Penyusunan Anggaran pada Pemerintah Kabupaten Bireuen. *Jurnal Kebangsaan* 1(1).
- Auditya, L dan H. Lismawati. 2013. Analisis Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal Fairness* 3(1). Universitas Bengkulu Indonesia.
- Bastian, I. 2008. *Akuntansi Kesehatan*. Gelora Aksara Pratama. Jakarta.
- Bharata, R. W. 2015. Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kinerja Pada Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari (RSUD) Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta. *Ekonomi, Manajemen & Akuntansi*. 13.
- Ghozali. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23*. Edisi Kedelapan. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Hambur, I. 2019. Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Fungsi Pemeriksaan Intern Terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 8(9):1-19.

- Jatmiko, Bambang. 2020. Pengaruh Pengawasan Internal, Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman. *Jurnal Akuntansi Trisakti* 7(2):231-246.
- Jitmau, F., K. Lintje., L. Linda. 2017. Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Fungsi Pemeriksaan Intern Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. 276_285.
- Mahsun, N. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. BPFE. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2004. *Akuntansi Sektor Publik*. Gramedia. Jakarta.
- Meme, N. 2019. Pengaruh Pengawasan Fungsional, Transparansi, Akuntabilitas, dan Pelayanan Publik Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 8(10):1-19.
- Mete, D. 2020. Pengaruh Pengawasan Fungsional, Transparansi Publik dan Akuntabilitas Publik Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 9(10):1-23.
- Novatiani, A., R. Kusumah, dan D. Vabiani. 2019. Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis* 10(1):51-61.
- Ratnawati, J. dan P.C.W. Arnold. 2011. Peran Manajerial Pengelola Keuangan Daerah, dan Fungsi Pemeriksaan Intern Serta Pengaruhnya Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Fakultas Ekonomi. *Jurnal Dian* 11(1):1-19.
- Rohman, 2007. Pengaruh Peran Manajerial Keuangan daerah Dan Fungsi Pemeriksaan Intern Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Survei pada Pemda Kota, Kabupaten Di Jawa Tengah). Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.
- Sabarno, H. 2007. *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Sedarmayanti. 2007. *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) dan GCG (Tata Kelola Pemerintah yang Baik)*. CV Mandar Maju. Bandung.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Alfabeta. Bandung.
- . 2017. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Suriani, S. 2015. The Effect of Performance-Based Budgeting Implementation towards the Institution Performance Accountability (Case Study:Wajo). *Jurnal Information Management and Business Review* 7(4): 6-22.